

Pola Penanganan Gelandangan Psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo

Zalfa Qurrotu'ain

Program Studi S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

Email: zalfa.22053@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas pola penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo dari perspektif sosiologis, dengan fokus pada pendekatan rehabilitasi sosial. Artikel ini membahas pola penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo dari perspektif sosiologis, dengan fokus pada pendekatan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menganalisis bagaimana lembaga tersebut merancang program rehabilitasi untuk individu dengan gangguan psikotik yang hidup di jalanan, serta dampaknya dalam memulihkan fungsi sosial mereka di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas program dalam menciptakan harmoni sosial dan memberdayakan individu agar kembali berperan dalam struktur masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kerangka analisis teori sosiologi struktural-fungsional oleh Talcott Parsons digunakan untuk menjelaskan bagaimana program rehabilitasi di Balai PRS PMKS berfungsi sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial. Teori ini menyoroti pentingnya setiap elemen masyarakat, termasuk lembaga sosial, dalam menjaga stabilitas sistem sosial secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan di Balai PRS PMKS Sidoarjo meliputi stabilisasi medis, terapi psikososial, dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga tahapan tersebut saling melengkapi dalam memulihkan fungsi individu sebagai bagian dari masyarakat. Efektivitas program terlihat dari kemampuan pasien yang berhasil reintegrasi sosial, meskipun dihadapkan pada kendala seperti stigma sosial dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat untuk menciptakan harmoni sosial yang inklusif.

Kata Kunci: Pola Penanganan, Gelandangan, Psikotik, Rehabilitasi

ABSTRACT

This article discusses the pattern of handling psychotic vagrants at the Sidoarjo PMKS PRS Center from a sociological perspective, with a focus on the social rehabilitation approach. This article discusses the pattern of handling psychotic vagrants at the Sidoarjo PMKS PRS Center from a sociological perspective, with a focus on the social rehabilitation approach. The research analyzes how the institution designs rehabilitation programs for individuals with psychotic disorders living on the streets, as well as their impact on restoring their social functioning in the community. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the program in creating social harmony and empowering individuals to return to their role in the fabric of society. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The analytical framework of structural-functional sociology theory by Talcott Parsons is used to explain how the rehabilitation program at Balai PRS PMKS functions as a mechanism for restoring social balance. This theory highlights the importance of every element of society, including social institutions, in maintaining the stability of the social system as a whole. The findings show that the treatment pattern at the Sidoarjo PMKS PRS Center includes medical stabilization, psychosocial therapy, and economic empowerment. The three stages complement each other in restoring individual functions as part of society. The effectiveness of the program can be seen in the ability of patients to successfully reintegrate into society.

Keywords : Handling Patterns, Homeless, Psychotic, Rehabilitation

1. PENDAHULUAN

Fenomena gelandangan dengan gangguan mental di Indonesia menjadi permasalahan sosial yang semakin mendesak untuk ditangani. Menurut angka Kementerian Sosial tahun 2019, terdapat sekitar 15.995 orang tuna wisma di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi tertinggi di daerah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya (Pandia, 2021). Misalnya, di Surabaya, jumlah tuna wisma meningkat dari 5.503 pada tahun 2019 menjadi 5.519 pada tahun 2020, mencerminkan semakin besarnya tantangan yang dihadapi masalah ini (Puspitasari & Nawangsari, 2024).

Tunawisma dengan psikosis adalah individu yang tidak hanya hidup dalam kondisi terabaikan, tetapi juga memiliki penyakit mental berat, yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk berfungsi secara sosial dan mandiri. Mereka sering terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan mental yang memadai. Stigma sosial terhadap gangguan mental juga memperburuk kondisi mereka, menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

Pengelolaan gelandangan gangguan jiwa di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diatur dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan sosial. Namun, implementasi kebijakan ini sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Banyak tunawisma yang menderita psikosis tidak menerima perawatan medis yang mereka butuhkan, sehingga menyebabkan kesehatan mental mereka memburuk.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengembangkan strategi adaptasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi. Integrasi sosial para tunawisma dengan penyakit mental. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan masalah ini dapat ditangani dengan lebih baik, membawa harapan baru bagi orang-orang yang kurang beruntung ini sehingga mereka dapat terus berkontribusi bagi masyarakat.

Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengeksplorasi model perawatan tunawisma dengan psikosis di PRS PMKS Sidoarjo sebagai studi kasus, serta menganalisis tantangan dan keberhasilan pendekatan tersebut. Undang-undang telah diterapkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan tuna wisma dengan psikosis di Indonesia.

Pentingnya penanganan yang tepat bagi gelandangan psikotik di Indonesia tidak dapat diabaikan, mengingat kondisi kesehatan mental mereka yang kompleks dan sering kali memerlukan intervensi khusus. Gelandangan psikotik adalah individu yang tidak hanya hidup dalam keadaan terlantar, tetapi juga mengalami gangguan jiwa berat, yang mengakibatkan hilangnya fungsi sosial dan kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Penanganan yang tidak memadai dapat memperburuk kondisi mereka, menyebabkan dampak negatif tidak hanya bagi individu tersebut tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Balai PRS PMKS Sidoarjo berperan penting dalam penanganan gelandangan psikotik. Lembaga ini menyediakan layanan rehabilitasi sosial dan medis yang dirancang untuk

membantu individu-individu tersebut kembali ke masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang optimal, termasuk rehabilitasi bagi gelandangan psikotik. Balai PRS PMKS Sidoarjo berfungsi sebagai pusat rehabilitasi yang menyelenggarakan berbagai program, mulai dari identifikasi kebutuhan, perawatan medis, hingga reintegrasi sosial.

Melalui pendekatan yang komprehensif, Balai PRS PMKS Sidoarjo tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga pada dukungan psikososial. Program-program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan gelandangan psikotik. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penanganan mereka.

Dengan demikian, penanganan yang tepat bagi gelandangan psikotik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Peran aktif Balai PRS PMKS Sidoarjo dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi kunci dalam upaya ini, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan bagi masalah gelandangan psikotik di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai model pengobatan tuna wisma psikosis yang diterapkan di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Kajian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai efektivitas program rehabilitasi yang dilaksanakan namun juga memberikan kontribusi teoritis melalui analisis dengan menggunakan pendekatan dan fungsi sosiologi struktural. Dengan menekankan peran institusi sosial dalam memulihkan fungsi individu dalam masyarakat, hasil penelitian ini akan menjadi dasar pengembangan kebijakan sosial yang lebih komprehensif dan berbasis bukti. Lebih lanjut, artikel ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma sosial terhadap gelandangan sakit jiwa dan mendorong penguatan institusi sosial dalam penanganan kelompok rentan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pola penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman, perspektif, dan tantangan yang dihadapi oleh gelandangan psikotik serta staf yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

mempelajari kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen utamanya, teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait.

Langkah pertama adalah transkripsi hasil observasi dan wawancara; kemudian, data yang dikumpulkan dari studi dokumentasi, wawancara, dan observasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Selanjutnya, peneliti menemukan tema-tema utama dari jawaban responden dan pengamatan lapangan. Tema-tema ini kemudian dibagi menjadi beberapa subtema yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial. Setiap subtema akan dianalisis untuk menemukan pola-pola yang menggambarkan bagaimana menangani gelandangan psikotik dan masalah yang dihadapi program rehabilitasi. Data dokumen akan digunakan untuk mendukung temuan dan memberikan konteks terhadap temuan utama yang muncul.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi yang relevan, menghubungkan hasil wawancara dan observasi dengan teori-teori yang ada, serta membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari pengolahan data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan pembahasan mengenai efektivitas pola penanganan dan saran untuk perbaikan program rehabilitasi.

Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu satu minggu, mulai tanggal 9-16 Januari. Selama periode ini, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Balai PRS PMKS Sidoarjo, yaitu bagian Tata Usaha (TU), Rehabilitasi Sosial (Resos), Pekerja Sosial (Peksos), dan pelayanan. Observasi dilakukan langsung terhadap kegiatan rehabilitasi yang berlangsung, sementara studi dokumentasi mencakup laporan tahunan dan data kasus pasien yang ada di balai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pola Penanganan Gelandangan Psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo

Setelah dilakukannya wawancara, observasi dan dokumentasi, penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo terdiri dari beberapa tahap, yaitu Proses penerimaan calon penerima manfaat (PM) di Balai PRS PMKS Sidoarjo diawali dengan rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota berdasarkan hasil penilaian cakupan atau laporan dari keluarga calon PM. Selanjutnya, Dinsos kabupaten/kota membuat surat rekomendasi atau

permohonan yang berisi informasi calon PM, termasuk kronologis kondisi yang bersangkutan. Surat tersebut dikirimkan ke pekerja sosial (peksos) di balai untuk dipelajari lebih lanjut. Setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan dan tim penerimaan, jika permohonan disetujui, balai mengirimkan balasan surat kepada Dinsos kabupaten/kota yang menyatakan bahwa calon PM dapat melanjutkan rehabilitasi di balai.

Tahapan berikutnya, Dinsos kabupaten/kota bersama keluarga calon PM (jika ada) atau kader kesehatan jiwa (keswa) mengantar calon PM ke balai. Setibanya di balai, dilakukan proses penerimaan, termasuk cross-check untuk memastikan kondisi calon PM sesuai dengan kronologis yang tercantum dalam surat awal. Setelah proses verifikasi selesai, calon PM menjalani pengasramaan sebagai bagian dari program rehabilitasi yang dirancang untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap calon PM mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sebelum adanya penerimaan, tentu terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar dapat diterima di Balai PRS PMKS Sidoarjo ini. Kriteria calon penerima manfaat (PM) yang dapat diterima di Balai PRS PMKS Sidoarjo merujuk pada ketentuan dalam PerGub, yang menyebutkan bahwa balai hanya menerima lima jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tuna susila (WTS), dan anak jalanan. Namun, dalam praktiknya saat ini, sebagian besar calon PM yang dirujuk ke balai adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Selain itu, calon PM harus memenuhi beberapa syarat tambahan, seperti memiliki kesediaan untuk menjalani rehabilitasi. Kesediaan ini menjadi hal yang krusial karena tanpa kemauan dari calon PM, proses rehabilitasi tidak akan berjalan optimal, bahkan berisiko menimbulkan perlawanan atau ketidakpatuhan. Calon PM juga tidak boleh memiliki penyakit fisik menular, mengingat balai memiliki sifat komunal dengan interaksi intensif antar penghuni. Persyaratan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan lingkungan balai, sekaligus memastikan keberhasilan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu calon PM kembali berfungsi secara sosial.

Setelah calon penerima manfaat (PM) diterima di Balai PRS PMKS Sidoarjo, mereka akan menjalani tahap isolasi selama satu minggu di asrama Cut Mutia. Tahap ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya perilaku agresif, kambuhnya gangguan psikotik, atau kondisi lainnya yang memerlukan penanganan khusus. Setelah masa isolasi selesai, dilakukan konsultasi dengan psikolog untuk menilai apakah PM sudah siap menjalani rehabilitasi bersama penghuni lain di balai. Proses rehabilitasi melibatkan pekerja sosial (peksos) yang melakukan

asesmen untuk memahami kebutuhan, kondisi, dan potensi PM secara mendalam. Selain itu, intervensi sosial dilakukan, termasuk pencarian keluarga jika PM masih memiliki kerabat, sebagai persiapan untuk proses pemulangan atau reintegrasi ke masyarakat. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan setiap PM mendapatkan penanganan yang sesuai dan dapat kembali berfungsi secara sosial dengan dukungan yang memadai.

Program penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo saat ini masih terbatas pada kegiatan yang sesuai dengan minat individu, tanpa adanya program khusus yang dirancang secara spesifik untuk kondisi mereka. Banyak gelandangan psikotik yang hanya mendapatkan perhatian dasar berupa pemenuhan kebutuhan makan, tidur, dan buang air. Namun, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, balai menawarkan keterampilan seperti pertanian, paving, sulam pita, banjari, dan tata rias. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan stimulasi dan mengalihkan perhatian mereka dari kondisi yang dialami.

Bimbingan yang diberikan diselingi dengan permainan untuk menarik minat peserta, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan terkait efisiensi waktu dan kecenderungan kegiatan yang monoton. Meskipun demikian, bimbingan ini berperan penting dalam merangsang gelandangan psikotik agar dapat berperilaku normal dan merasa dihargai. Melalui pendekatan ini, diharapkan individu-individu tersebut dapat menemukan kembali rasa percaya diri dan kemampuan sosial mereka, serta mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani rehabilitasi.

Pemantauan dan tindak lanjut setelah PM diterima di balai dilakukan secara terkoordinasi antara pekerja sosial (peksos) dan pelayanan. Dari sudut pandang peksos, PM yang berada di ruang isolasi akan dipantau secara berkala, yaitu sehari atau dua hari sekali, untuk memastikan mereka tidak merasa tertekan. Setelah seminggu, PM akan diarahkan ke program peminatan sesuai keinginan mereka sambil memastikan kondisi mental mereka, seperti apakah ada rasa takut terhadap keramaian atau hal lain yang menghambat adaptasi. Peksos juga berdiskusi dengan psikolog untuk menentukan apakah PM sudah siap dikeluarkan dari isolasi atau belum.

Sementara itu, dari sudut pandang pelayanan, disiapkan asrama dan kebutuhan pokok klien seperti makanan, pakaian, alat kebersihan diri, dan obat-obatan ringan untuk flu, sakit kepala, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan melalui kontrol asrama, terutama oleh petugas piket malam. Kondisi klien sering kali terlihat lebih jelas pada malam hari, misalnya jika ada yang tidak bisa tidur, berbicara sendiri, atau mondar-mandir. Informasi dari kontrol malam tersebut kemudian disampaikan kepada peksos untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Lembaga dan organisasi yang bekerja sama dengan Balai PRS PMKS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi berbagai instansi, seperti Dinas Sosial se-Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya, RSJ Radjiman Wedyodiningrat Lawang, serta beberapa UPT seperti RS Bina Karya, RS Karya Wanita, RS Bina Laras, RS Asuhan Anak, RS Bina Remaja, dan RS Asuhan Balita. Selain itu, Balai juga bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial lainnya.

RSUD Sidoarjo menjadi mitra penting untuk menangani PM psikotik yang memerlukan tenaga medis serta PM yang membutuhkan layanan pemulasaraan jenazah, seperti penentuan penyebab kematian dan proses pemandian jenazah. Dalam upaya jejaring, kader kesehatan jiwa (keswa) juga dilibatkan, salah satunya di wilayah Tulungagung. Di sana akan dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran keluarga sebagai penanggulangan pertama sebelum PM dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke upt rehabilitasi.

3.2 Efektivitas Pola Penanganan

Berdasarkan wawancara dengan pasien yang telah direhabilitasi, sebagian besar merasa bahwa pendekatan ini membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Temuan ini juga didukung oleh data dokumentasi balai, yang menunjukkan bahwa 70% pasien berhasil reintegrasi ke masyarakat dalam kondisi stabil.

Dalam wawancara mengenai efektivitas program balai, berbagai pendapat muncul dari para narasumber. Menurut BW sebagai Kepala Sub Bagian TU, program ini sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki ruang untuk pengembangan dan inovasi baru. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sudah bagus, program tersebut belum mencapai potensi maksimalnya. Seperti yang disampaikan pada wawancaranya:

“kalau program alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun dari pihak balai masih ingin membuat pengembangan dan inovasi-inovasi baru lagi karena program-programnya masih belum maksimal” (Wawancara dilakukan 16 Januari 2025)

Di sisi lain, BE merasa bahwa program ini sangat efektif, terbukti dengan respon positif dan timbal balik yang baik di lapangan. Seperti wawancara yang telah dilakukan: *“alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, respon dan timbal balik dari Penerima Manfaat disini juga bagus”* (Wawancara dilakukan 16 Januari 2025)

PF menambahkan bahwa meskipun sudah berusaha untuk menjalankan program secara efektif, adanya beberapa hambatan menyebabkan tingkat efektivitasnya baru mencapai sekitar 70%. Meski begitu, ia menilai program ini cukup sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan berlandaskan pada dasar yang jelas.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi pola penanganan. Menurut BW, salah satu tantangan utama adalah ketika penerima manfaat (PM) hidup dalam ketidaksadaran, yang mengharuskan pendamping untuk selalu mengontrol emosi mereka, mengingat perilaku PM yang tidak menentu. Selain itu, BW juga menghadapi kesulitan dalam meyakinkan keluarga untuk menerima PM. Ia menyatakan:

“Sebagai pendamping, kita harus sabar dan mengerti, karena PM sering kali tidak sadar dengan kondisi mereka. Selain itu, keluarga juga harus diyakinkan untuk menerima keadaan tersebut.”

(Wawancara dilakukan 16 Januari 2025)

BE juga menyebutkan beberapa kendala, seperti materi yang diberikan saat bimbingan terkadang sulit dipahami oleh sebagian PM. Ia mengatakan:

“Tidak semua PM bisa memahami materi yang diberikan. Ada yang mengerti, tetapi ada juga yang kesulitan, jadi perlu pendekatan lebih.” (Wawancara dilakukan 16 Januari 2025)

Selain itu, BE juga mengungkapkan adanya tantangan dalam menarik minat PM terhadap kegiatan yang diselenggarakan, yang terkadang kurang mendapat perhatian.

PF sebagai Pekerja Sosial mengidentifikasi beberapa hambatan terkait stabilitas PM yang naik turun, yang sering kali membuat program sulit untuk mencapai hasil yang konsisten. Ia juga mencatat adanya masalah dengan masyarakat yang kurang menerima keadaan PM setelah mereka pulang. Tidak hanya itu, PF menambahkan:

“Kadang ada pegawai yang kurang mengerti bagaimana seharusnya memperlakukan PM, dan ini bisa membuat kondisi mereka turun lagi setelah berada dalam keadaan baik.” (Wawancara dilakukan 16 Januari 2025)

Kendala-kendala ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai kebutuhan dan karakteristik PM serta perlunya komunikasi yang baik dengan keluarga dan masyarakat.

3.3 Analisis dengan Teori Struktural-Fungsional

Dalam konteks teori sosiologi struktural-fungsional, Balai PRS PMKS Sidoarjo berperan sebagai lembaga yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dengan mengembalikan individu yang terpinggirkan ke dalam struktur masyarakat. Program rehabilitasi yang diterapkan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan adaptasi (*adaptation*) melalui stabilisasi medis, pencapaian tujuan (*goal attainment*) melalui pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial

(*integration*) melalui terapi psikososial. Dengan demikian, balai ini tidak hanya membantu individu, tetapi juga berkontribusi pada harmoni dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan kemampuan adaptasi sosial pasien psikotik. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian integral dari rehabilitasi, yang jarang dibahas dalam studi-studi serupa. Dengan pendekatan terintegrasi ini, Balai PRS PMKS Sidoarjo menjadi contoh yang relevan bagi lembaga rehabilitasi lain dalam menangani gelandangan psikotik secara holistik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa balai ini telah melaksanakan program rehabilitasi yang komprehensif melalui beberapa tahapan yang terstruktur, mulai dari penerimaan, verifikasi, hingga program rehabilitasi. Setiap tahap penanganan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial gelandangan psikotik agar mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Proses isolasi awal dan konsultasi dengan psikolog juga menunjukkan upaya yang serius dalam menyesuaikan pendekatan dengan kondisi individu yang membutuhkan perhatian khusus.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kesulitan dalam menarik minat PM terhadap kegiatan yang diselenggarakan dan tantangan dalam meyakinkan keluarga untuk menerima kondisi mereka, program ini tetap menunjukkan efektivitasnya. Dari hasil wawancara dan data dokumentasi balai, dapat dilihat bahwa sekitar 70% pasien berhasil reintegrasi ke masyarakat dalam kondisi stabil, meskipun program ini masih memiliki potensi pengembangan.

Dalam perspektif teori Struktural Fungsional, Balai PRS PMKS Sidoarjo berperan penting sebagai lembaga sosial yang tidak hanya memberikan rehabilitasi medis dan sosial, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dengan membantu individu gelandangan psikotik kembali ke dalam struktur masyarakat. Pendekatan rehabilitasi yang holistik dan terintegrasi ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan terapi psikososial sebagai bagian dari proses adaptasi sosial, yang relevan dengan tujuan teori ini, yaitu menjaga keseimbangan sosial melalui integrasi dan stabilitas.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, pola penanganan gelandangan psikotik di Balai PRS PMKS Sidoarjo telah memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan individu serta stabilitas sosial yang lebih luas. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas program rehabilitasi dan penguatan kolaborasi antara lembaga terkait untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Bharoto, R. M. H., & Nursahidin, N. (2021, Februari). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGANAN PENGEMIS GELANDANGAN ORANG TERLANTAR DAN PSIKOTIK JALANAN DI KOTA CIREBON. *Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 82-87. <http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>
- Cahyaningrum, P., & Syafiq, M. (2022). GAMBARAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA TERLANTAR. *Character : Jurnal Penelitian Psikolog*, 9(1), 100-114. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i1.44824>
- Hardianto, M., Zainal R, A., & Jasma, S. (2021, November). Manajemen Pemberdayaan Bidang Ekonomi di Masjid Baitul Atieq. *Journal of Lifelong Learning*, 4(2), 126-132. <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.126-132>
- Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022, Juni). KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS BERBASIS PANTI UNTUK KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) (STUDI PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN ORANG TERLANTAR MARDI UTOMO SEMARANG. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103-117. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208>
- Ningsih, W. (2018, Agustus Digital Repository Unila). *BENTUK DAN TAHAPAN REHABILITASI GELANDANGAN PSIKOTIK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ORANG DENGAN KELAINAN (LKS ODK) EKPSIKOTIK AULIA RAHMA KOTA*

- BANDARLAMPUNG*. Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Retrieved Januari 16, 2025, from <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32769>
- Pandia, A. S. (2021, Februari 2). *Mensos: Pengentasan Gelandangan Tidak Lagi Berupa Proyek*. Kompas. Retrieved Januari 16, 2025, from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2021/02/02/mensos-pengentasan-gelandangan-tidak-lagi-berupa-proyek>
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur. (2018, Agustus 27). *NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR*. NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR. Retrieved Januari 16, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104795/pegub-prov-jawa-timur-no-85-tahun-2018>
- Puspitasari, N. Z., & Nawangsari, E. R. (2024, Desember). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Penderita Psikotik di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 8(4), 602-608. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.165>
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.